



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.1509-Bagor/2026
TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, diperlukan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Implementasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi general dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KELIMA : Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



**RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026**

No	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2025	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Koordinator	Pelaksana
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Tingkat capaian Sistem kerja penyederhanaan Birokrasi	3	4	4	strategis yang memuat langkah-langkah sistematis, target, dan jadwal penyelesaian pelaksanaan tugas guna mencapai indikator kinerja utama suatu instansi dalam periode tertentu	Dokumen	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	1	Rp 50.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks SPBE	9	4,66	4,68	Perubahan Index SPBE menjadi Index Pemdi (Pemerintah Digital)	Indeks	Nilai Index Pemerintah Digital	-	-	-	2.1	2.1	Rp 16..000.000	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
3	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	0	3	Review Arsitektur SPBE	Indeks	Tersusunnya Arsitektur SPBE/Pemerintahan Digital 2025-2029	-	-	-	3	3	Rp 170.000.000	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
4	Nilai SAKIP	4	82,26	82,31	Rencana Aksi Komponen Perencanaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu RPJMD Tahun 2025 - 2029	-	-	-	1	-	Rp. 48.000.000	Bapperida	Seluruh Perangkat Daerah

					Persiapan Tim Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp. 438.965.050	Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
					Asistensi Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap data akhir target Perangkat Daerah yang tertuang	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp. 31.200.000	Seluruh PD	Setda (Bagian Organisasi)
					Asistensi Perangkat Daerah (unit kerja) / Penyusunan LKIP Kota dan Pengumpulan Analisis Data Capaian Kinerja IKU Kota	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp. 68.040.000	Seluruh PD	Setda (Bagian Organisasi)
					Pengolahan dan verifikasi data capaian kinerja, penyalarsan dan verifikasi data akhir hasil reuiu APIP Inspektorat	Dokumen	Jumlah dokymen dokumen koordinasi dan pennysusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp. 6.600.000	Seluruh PD	Bapperida
					Rencana Komponen Pelaporan : Persiapan Tim Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	Surat Keputusan	Jumlah Dokumen Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	-	1	-	-	1	Rp 14.448.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
					Asistensi Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap data akhir target Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan dalam bentuk Berita Acara	Dokumen	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan berita acara Perangkat Daerah	61	-	-	-	61	Rp 104.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah

					Asistensi Perangkat Daerah (unit kerja) / Penyusunan LKIP Kota dan Pengumpulan Analisis Data Capaian Kinerja IKU Kota	Dokumen	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian indicator kinerja utama Perangkat Daerah	61	-	-	-	61	Rp 92.400.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah	Se
					Pengolahan dan verifikasi data capaian kinerja, penyalarsan dan verifikasi data akhir hasil reuiu APIP Inspektorat	Dokumen	Jumlah dokumen hasil verifikasi laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	61	-	-	-	61	Rp 30.960.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah	
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja		21,67	21,77	Melakukan pendampingan penggunaan Aplikasi SEMAKIN-PD	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan	-	61	-	-	61	Rp 47,250,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah	
			48,24	48,25	Melakukan reuiu RPJMD Tahun 2025-2029	Dokumen	Jumlah Dokumen Reuiu RPJMD	-	-	-	1	1	Rp. 55.758.000	Bapperida	Bapperida	
					Melakukan asistensi dan reuiu atas penjabaran kinerja/cascading kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang PPIPW dengan memastikan: 1. kesesuaian antara sasaran dan indikator kinerja pada setiap level 2. Pemenuhan kriteria SMART pada setiap indikator kinerja di setiap level 3. crosscutting kinerja lintas bidang maupun lintas urusan Perangkat Daerah 4. Rencana aksi sudah sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan	Laporan	Jumlah Laporan hasil Asistensi dan Reuiu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	-	-	1	-	1	Rp. 62.903.700	Seluruh PD (Lingkup Bidang Infrastruktur)	Bapperida	
						Laporan	Jumlah Laporan hasil Asistensi dan Reuiu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	-	-	1	-	1	Rp. 99.644.700	Seluruh PD (Lingkup Bidang Infrastruktur)	Bapperidda	

					Melakukan asistensi dan reviu atas penjabaran kinerja/cascading kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang PPEPP dengan memastikan: 1. kesesuaian antara sasaran dan indikator kinerja pada setiap level 2. Pemenuhan kriteria SMART pada setiap indikator kinerja di setiap level 3. crosscutting kinerja lintas bidang maupun lintas urusan Perangkat Daerah 4. Rencana aksi sudah sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan Melakukan asistensi dan reviu atas penjabaran kinerja/cascading kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang PPPM dengan memastikan: 1. kesesuaian antara sasaran dan indikator kinerja pada setiap level 2. Pemenuhan kriteria SMART pada setiap indikator kinerja di setiap level 3. crosscutting kinerja lintas bidang maupun lintas urusan Perangkat Daerah 4. Rencana aksi sudah sepenuhnya menjabarkan kegiatan-	Laporan	Jumlah Laporan hasil Asistensi dan Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	-	-	1	-	1	Rp. 43.030.000	Seluruh PD (Lingkup Bidang perekonomian)	Bapperida
						Laporan	Jumlah Laporan hasil Asistensi dan Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	-	-	1	-	1	Rp. 59.100.000	Seluruh PD (Lingkup Bidang Pemerintahan)	Bapperida
						Laporan	mlah Laporan hasil Asistensi dan Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	1	1	Rp. 100.200.000	Seluruh PD (Lingkup Bidang pembangunan Manusia)	Bapperida

					kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan										
					melakukan monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan lingkup bidang PPIPW dan Evaluasi atas Penjabaran IKU PD Tahun 2025 dan 2026	Laporan	Laporan hasil monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan dan kesesuaian penjabaran IKU PD lingkup bidang Infrastruktur	-	-	-	1	1	Rp. 561.379.170	Seluruh PD (Lingkup Bidang Infrastruktur)	Bapperida
					yang telah di Perkadakan dengan fokus pada ketepatan: 1. definisi operasional 2. formulasi perhitungan 3. sumber data 4. Penetapan Target	Laporan	Laporan hasil monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan dan kesesuaian penjabaran IKU PD lingkup bidang Kewilayahan-	-	-	-	1	1	Rp. 80.510.000	Seluruh PD (Lingkup Bidang Kewilayahan)	Bapperida
					melakukan monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan lingkup bidang PPEPP dan Evaluasi atas Penjabaran IKU PD Tahun 2025 dan 2026 yang telah di Perkadakan dengan fokus pada ketepatan: 1. definisi operasional	Laporan	Laporan hasil monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan dan kesesuaian penjabaran IKU PD lingkup	-	-	-	1	1	Rp. 585.133.630	Seluruh PD (Lingkup Bidang perekonomian)	Bapperida

					2. formulasi perhitungan 3. sumber data 4. Penetapan Target		bidang Perekonomian								
					melakukan monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan lingkup bidang PPPM dan Evaluasi atas Penjabaran IKU PD Tahun 2025 dan 2026 yang telah di Perkadakan dengan fokus pada ketepatan: 1. definisi operasional 2. formulasi perhitungan 3. sumber data 4. Penetapan Target	Laporan	Laporan hasil monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan dan kesesuaian penjabaran IKU PD lingkup bidang Pemerintahan	-	-	-	1	1	Rp. 316.770.000	Seluruh PD (Lingkup Bidang pemerintahan)	Bapperida
					melakukan monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan lingkup bidang PPPM dan Evaluasi atas Penjabaran IKU PD Tahun 2025 dan 2026 yang telah di Perkadakan dengan fokus pada ketepatan: 1. definisi operasional 2. formulasi perhitungan 3. sumber data 4. Penetapan Target	Laporan	Laporan hasil monev ketercapaian outcome yang diperjanjikan melalui evaluasi atas kinerja rencana aksi kegiatan dan kesesuaian penjabaran IKU PD lingkup bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	1	1	Rp. 292.405.859	Seluruh PD (Lingkup Bidang Pembangunan Manusia)	Bapperida
5	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,5	0	4	Melakukan Monev terhadap PD yang telah meraih predikat WBK dan WBBM pada Tahun sebelumnya	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monev Pembangunan Zona Integritas	-	-	4	-	4	Rp 19,500,000,00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah

					Melakukan pendampingan pembangunan Zona Integritas tingkat Kota Bandung pada setiap Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	-	-	-	61	61	Rp 35,600,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah
					Melakukan pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah yang akan diusulkan untuk meraih Predikat WBK dan WBBM Tahun 2026	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dipersiapkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas	-	-	4	-	4	Rp 20,500,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah
6	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.10	3.12	Persiapan Penjaminan Kualitas	Dokumen	Jumlah Dokumen Persiapan Penjaminan Kualitas SPIP	-	1	-	-	1	Rp 25,500,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah (Penjaminan Kualitas)
					Pelaksanaan Penjaminan Kualitas	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penjaminan Kualitas	-	10	-	-	10	Rp 51,300,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah (Penjaminan Kualitas)

					Penyusunan Laporan Penjaminan Kualitas	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	-	1	-	-	1	Rp 15,720,000.00	Seluruh PD	Inspektorat Daerah (Penjaminan Kualitas)
7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah dilaporkan	2,5	4	4	Menindaklanjuti aduan masyarakat sesuai dengan batas waktu sesuai regulasi	Dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	4	Rp 26.000.000	Diskomnfo	Seluruh Perangkat Daerah
8	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	69.17	-	Menindaklanjuti Rekomendasi SPI 2025	Dokumen	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut SPI 2025	-	-	-	1	1	Rp12.744.000.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
					2. Melakukan pendampingan kepada setiap perangkat daerah yang akan diusulkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM Tahun 2026.	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dipersiapkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas	-	-	4	-	4	Rp 37.800.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

9	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	88.90	89	Melaksanakan Penyusunan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	1	1	Rp 5,000,000.00	Seluruh PD	Setda (Bagian Hukum)
					Melaksanakan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Dukung Penilaian IKK	-	-	-	1	1	Rp 15,000,000.00	Seluruh PD	Setda (Bagian Hukum)
10	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,64	98	Optimalisasi pemenuhan data dukung penilaian pada masing-masing variabel penilaian IRH	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Dukung Penilaian IRH	-	-	-	1	1	Rp 15.000.000	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh Perangkat Daerah
11	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	74,91	78,00	pelaksanaan pameran digital sebanyak 2 kali	Kegiatan	terlaksananya pameran digital arsip	-	-	-	78,3	78,3	Rp 153, 840, 450.00	Seluruh PD	Disarpus

12	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,04	3,05	Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi Tahun 2026	Indeks	Jumlah indeks Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi Tahun 2026				3,05	3,05	Rp 650.000.000	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	85,01	86,03	Peningkatan Bobot Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Dokumen	Dokumen kegiatan untuk peningkatan nilai indikator pemanfaatan sistem pengadaan	1	1	1	1	4	Rp 72.898.000	Seluruh PD	Setda (Bag. PBJ)
					Peningkatan Bobot Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Dokumen	Dokumen kegiatan untuk Peningkatan Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	1	1	1	1	1	Rp 300,244,800.00	BKPSDM dan Bagian PBJ	Setda (Bag. PBJ)
					Peningkatan Bobot Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Dokumen	Dokumen kegiatan untuk Peningkatan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	1	1	1	1	4	Rp 133,880,000.00	Seluruh PD	Setda (Bag. PBJ)

14	Opini BPK	5	2	WTP	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK RI	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung	-	WTP	-	-	-	Rp19.439.055.690,65	Seluruh PD	BKAD
15	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	84,43	84,43	Melakukan pendampingan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Perangkat Daerah dalam TLHP BPK RI	-	-	-	1	1	Rp 141.600.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
					Melakukan monitoring progres tindak lanjut melalui kegiatan pemutakhiran progres TLHP BPK sekaligus penginputan data melalui Aplikasi BPK RI	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemutakhiran TLHP BPK	-	-	-	1	1	Rp 74.880.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
16	Indeks Sistem Merit	4	359,5	369	Melaksanakan penilaian kompetensi bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Orang	Jumlah Pegawai yang mengikuti penilaian kompetensi	45	490	380	255	1170	Rp 623,902,230.00	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

					Melaksanakan penyusunan talent pool untuk Jabatan Camat	Dokumen	Jumlah Dokumen talent pool untuk Jabatan Camat	-	-	1	-	1	Rp 24,000,000.00	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Melaksanakan program pengembangan kompetensi melalui Magang/Praktik Kerja dan Coaching Mentoring secara terjadwal dan di evaluasi secara berkala	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan program magang/praktik kerja dan coaching mentoring	-	-	-	2	2	Rp 3,630,000.00	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Menyusun draf kebijakan tentang Manajemen Talenta dengan berpedoman pada Peraturan Menpan RB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan manajemen talenta	-	-	-	1	1	Rp 10,000,000.00	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Melaksanakan Asistensi Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Rencana SKP Pegawai serta tim kerja	Kegiatan	Jumlah Laporan kegiatan asistensi penyusunan Matriks Peran Hasil	1	-	-	-	1	RP 40,810,000.00	Seluruh PD	BKPSDM

17	Indeks BerAkhlak	4	82,9	84,17	Pelatihan ASN Berintegritas kepada seluruh pegawai	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan ASN Berintegritas	1	1	1	1	4	Rp 15,284,214.00	Seluruh PD	BKPSDM
					Penyusunan draf kebijakan Pelaksanaan Implementasi ASN BerAKHLAK	Draf Kebijakan	Jumlah Draf Kebijakan Pelaksanaan Implementasi ASN BerAKHLAK	-	-	-	1	1	Rp 2,500,000.00	BKPSDM	BKPSDM
18	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,08	85,15	melaksanakan pengukuran dan memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1	-	1	2	Rp 50.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik	2	93,00	93,15	Pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat serta melakukan pencegahan maladministrasi	Nilai	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	1	-	1	Rp 25.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	5 Perangkat Daerah

20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	93	93,15	Pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat serta melakukan pencegahan maladministrasi	Nilai	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	1	-	1	Rp 25.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	5 Perangkat Daerah
----	--	---	----	-------	---	-------	--	---	---	---	---	---------------	---------------------------	--------------------

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002